

Judul : Tak ada jaminan kesehatan, legislator ingatkan bahaya haji ilegal
Tanggal : Minggu, 01 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Tak Ada Jaminan Keselamatan Legislator Ingatkan Bahaya Haji Ilegal



FOTO TEDY RINI

Maman Imanul Haq

ANGGOTA Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq menyoroti maraknya tawaran berangkat haji menggunakan visa non-resmi alias ilegal. Ditegaskan, jalur ilegal tidak memberikan jaminan keamanan selama berada di Arab Saudi.

"Berangkat haji harus diniatkan dengan baik dan dilakukan sesuai aturan agar tidak berujung mudarat (kerusakan)," ujar Maman dalam keterangannya, Sabtu (31/1/2026).

Maman bilang, penggunaan visa haji ilegal tidak hanya berisiko hukum, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa. Jemaah yang menggunakan jalur tidak resmi dipastikan tidak akan mendapatkan akses pelayanan kesehatan, perlindungan, maupun fasilitas akomodasi yang layak selama di Tanah Suci. "Jangan pertaruhkan nyawa demi berangkat cepat," tandasnya.

Pada musim haji tahun ini, lanjutnya, pemeriksaan dokumen di Madinah dan Makkah akan dilakukan secara sangat ketat. Bahkan Pemerintah Arab Saudi akan memperketat pengamanan hingga delapan lapis pada penyelenggaraan Haji 2026 ini.

Tanpa visa haji resmi, jemaah hampir mustahil dapat memasuki wilayah puncak haji. "Tentunya juga berisiko menghadapi deportasi, denda hingga ratusan juta rupiah, hingga ancaman penjara dari otoritas Saudi," jelasnya.

Maman lalu mengingatkan kembali tragedi pada tahun 2025. Saat itu seorang warga Pamekasan, Madura ditemukan meninggal dunia di gurun Tan'im akibat menggunakan visa ilegal. Kasus tersebut menjadi bukti betapa rentannya jemaah non-resmi saat terjadi kondisi darurat kesehatan karena tidak terdata dalam sistem resmi penyelenggaraan haji.

"Jemaah haji ilegal tidak terdata, sehingga sulit mendapat pertolongan medis cepat," ucap politikus PKB ini.

Selain itu, Maman mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengencangkan sosialisasi dan edukasi mengenai risiko jalur haji non-prosedural. Masyarakat diminta waspada terhadap oknum yang menjanjikan keberangkatan cepat tanpa antrai, namun mengabaikan aspek legalitas dan keselamatan.

"Edukasi harus diperkuat. Jangan sampai niat ibadah yang mulia justru berakhir pada kerugian materi dan hilangnya nyawa hanya karena ingin menempuh jalur singkat yang tidak resmi," ujarnya.

Sementara, anggota Komisi VIII DPR Muhammad Abdul Azis Sefudin meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Khususnya akibat fluktuasi nilai tukar rupiah.

Menurut dia, dinamika geopolitik global seperti penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat, perang Rusia-Ukraina yang belum usai, serta persoalan di wilayah Greenland, Denmark turut berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.

"Adanya kondisi geopolitik yang panas harus diantisipasi karena berpengaruh terhadap kondisi ketidakpastian nilai tukar rupiah terhadap dolar AS," kata Azis dalam keterangannya, Sabtu (31/1/2026). ■ TIF